JADWAL

Tanggal Efektif	:	9 Juni 2016
Masa Penawaran	:	10 Juni dan 13 Juni 2016
Tanggal Penjatahan	:	14 Juni 2016
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	16 Juni 2016
Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Juni 2016

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2016

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ini diterbitkan dengan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri A sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri A akan dilakukan pada tanggal 16 September 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri B sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Seri B akan dilakukan pada tanggal 16 September 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Seri A		Seri B	
Bunga Ke-	Tanggal	Bunga Ke-	Tanggal
1	16 September 2016	1	16 September 2016
2	16 Desember 2016	2	16 Desember 2016
3	16 Maret 2017	3	16 Maret 2017
4	16 Juni 2017	4	16 Juni 2017
5	16 September 2017	5	16 September 2017
6	16 Desember 2017	6	16 Desember 2017
7	16 Maret 2018	7	16 Maret 2018
8	16 Juni 2018	8	16 Juni 2018
9	16 September 2018	9	16 September 2018
10	16 Desember 2018	10	16 Desember 2018
11	16 Maret 2019	11	16 Maret 2019
12	16 Juni 2019	12	16 Juni 2019
13	16 September 2019	13	16 September 2019
14	16 Desember 2019	14	16 Desember 2019
15	16 Maret 2020	15	16 Maret 2020
16	16 Juni 2020	16	16 Juni 2020
17	16 September 2020	17	16 September 2020
18	16 Desember 2020	18	16 Desember 2020
19	16 Maret 2021	19	16 Maret 2021
20	16 Juni 2021	20	16 Juni 2021
		21	16 September 2021
		22	16 Desember 2021
		23	16 Maret 2022
		24	16 Juni 2022
		25	16 September 2022
		26	16 Desember 2022
		27	16 Maret 2023
		28	16 Juni 2023

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi

Obligasi ini dijamin dengan Jaminan berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan, dengan nilai Jaminan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Berikut ini rincian mengenai tanah dan/atau tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan atas penerbitan Obligasi Perseroan:

No.	Aset dan Lokasi	Luas (m2)	Status Kepemilikan	Nilai* (Rp)
1.	Tanah kosong di Desa Cijantra, Kabupaten Tangerang	682.459	Sertifikat Hak Guna Bangunan ** atas nama Perseroan dan PT Apta Citra Universal ***	661.530.000.000
Total				661.530.000.000

Keterangan :

* berdasarkan hasil penilaian KJPP Rengganis, Hamid & Rekan.

** Masa berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan tanah tersebut bervariasi antara sampai dengan tahun 2028 dan 2044, kecuali untuk 2 sertipikat atas nama PT Apta Cipta Universal yaitu; (i) SHGB No. 7/Cijantra dan (ii) SHGB No. 9/Cijantra, yang telah berakhir pada tanggal 12 Juni 2015 dan sedang diperpanjang.

*** Untuk jaminan berupa tanah yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan saat ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yang mana uraian tentang Perjanjian Kerjasama tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab VII Prospektus Awal tentang Keterangan Perseroan dan Anak Perusahaan poin 9 tentang transaksi dengan pihak afiliasi.

Keterangan selengkapnya mengenai Jaminan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana.

Pembatasan, Kewajiban Dan Kelalaian Perseroan

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab XVIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus.

Tambahan Utang Yang Dapat Diperoleh Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Cara Pelunasan Pokok Obligasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi dengan menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Dalam hal Perseroan berencana untuk menambah pinjamannya di masa yang akan datang, Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap saat keadaan keuangan Perseroan dalam kondisi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat PT Bank Permata Tbk, adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788 Faksimili : (021) 2500529
Up. Securities & Agency Services

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Perpajakan

Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI mengenai Perpajakan.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.577/PEF-Dir/IV/2016 tanggal 1 April 2016 dari Pefindo, Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

idAA-
(*Double A Minus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 31 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Rating Rationale

Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idAA- mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan Perseroan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek hutang yang peringkatnya lebih tinggi.

Penjelasan lengkap mengenai *Rating Rationale* dari Pefindo dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian, berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas Ini Merupakan Tambahan Dan/Atau Perbaikan Informasi Atas Prospektus Ringkas Yang Dimuat Di Surat Kabar Investor Daily Tanggal 16 Mei 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

BSD CITY
BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang pembangunan (*real estate*) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Berkedudukan di Tangerang, Banten

KANTOR PUSAT :
Sinar Mas Land Plaza
Grand Boulevard, BSD Green Office Park
BSD City, Tangerang 15345
Telepon : (021) 50 368 368 (*hunting*)
Faksimili : (021) 5058 8278

KANTOR CABANG :
Kompleks Ruko Villa Bukit Mas
Jl. Abdul Wahab Siamin Blok RC – 36
Surabaya 60225
Telepon : (031) 5671393, 5617000
Faksimili : (031) 5613917

Website : www.bsdcity.com
E-mail : corporate.secretary@sinarmasland.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2016")

Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ini diterbitkan dengan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri A sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri A akan dilakukan pada tanggal 16 September 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2021.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri B sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri B akan dilakukan pada tanggal 16 September 2016 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2023

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II")
dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN BERUPA TANAH DAN/ATAU TANAH DAN BANGUNAN, DENGAN NILAI JAMINAN MINIMAL SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI OLEH PERSEROAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI *BUY BACK* DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN BERASAL DARI RISIKO BERKURANGNYA CADANGAN LAHAN GRUP BSD DAN KEPEMILIKAN LAHAN PERSEROAN DI AREA BSD CITY. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
Id AA- (*DOUBLE A MINUS*)
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2017
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIX PROSPEKTUS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI / PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS | **PT Mandiri Sekuritas** | **PT Indo Premier Securities** | **PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)**

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran Obligasi Perseroan.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2016

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 yaitu sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Telah menjadi Emiten paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
3. Sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jauh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2015 perihal Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-020/PSS/2015/DAU tanggal 1 September 2015.
4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

a. Sekitar 40% untuk pembebasan tanah di areal pengembangan Perseroan,
b. Sekitar 40% untuk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan Perseroan;
c. Sekitar 20% digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain beban operasional seperti biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan lain-lain.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No.30.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No.30.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam No. IX.E.2.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Perkiraan rincian biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 1,60% (satu koma enam persen), yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,40%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan *(management fee)* 0,30%, biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)* 0,05%, dan biaya jasa penjualan *(selling fee)* 0,05%;
b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,47%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan sekitar 0,08%, biaya konsultan hukum sekitar 0,28%, biaya notaris sekitar 0,03%, dan biaya jasa penilai 0,08%;
c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,43% yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,28%, dan perusahaan pemeringkat efek sekitar 0,15%,
d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,033%, terdiri dari BEI sekitar 0,03% dan KSEI sekitar 0,003%;
e. Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK sekitar 0,12%;
f. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,16%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan melakukan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 ke dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Penawaran Umum terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp1.750.000.000.000,- (Satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang tercantum dalam prospektus, serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 dengan surat No.038/IR-MA/BSD/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No.8 tanggal 5 April 2016sebagaimana telah diubah pada Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 20 tanggal 29 April 2016 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 22 tanggal 31 Mei 2016 yang kesemuanya dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, para Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Seri A 5 (lima) tahun	Seri B 7 (tujuh) tahun	Jumlah	Persentase
1.	PT Indo Premier Securities	275.000	22.000	297.000	45,69%
2.	PT Mandiri Sekuritas	162.000	-	162.000	24,92%
3.	PT BCA Sekuritas	63.000	-	63.000	9,69%
4.	PT Sinarmas Sekuritas	125.000	3.000	128.000	19,69%
Total		625.000	25.000	650.000	100,00%

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Sinarmas Sekuritas. Bentuk hubungan afiliasi yang ada antara PT Sinarmas Sekuritas dengan Perseroan adalah hubungan keluarga antara Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas dengan Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Direktur Perseroan.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 dengan Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016.

Penjelasan Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016.

Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 di KSEI yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi), bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan memakai syarat-syarat sebagai berikut :

2.1 Nama Obligasi :

Obligasi diterbitkan dengan nama OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2016.

2.2 Utang Pokok Obligasi :

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan dalam jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga pokok Obligasi yang terbagi dalam 2 (dua) seri dimana masing-masing nilainya adalah sebagai berikut :

Obligasi Seri A : sebesar Rp625.000.000.000- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri B : sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

yang merupakan surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

2.3 Jatuh Tempo Obligasi:

a. Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi :
Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi berbeda-beda sesuai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dari Perjanjian Perwaliamanatan;
b. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2.4 Obligasi Merupakan Bukti Hutang :

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengaku berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamantan.

2.5 Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.

2.6 Pendaftaran Obligasi Di KSEI :

1. Obligasi akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal.

2.7 Bunga Obligasi:

A. Sifat dan besarnya tingkat bunga;
Tingkat Bunga Obligasi adalah bersifat tetap dengan ketentuan tingkat bunga tetap yaitu 9,00% (sembilan persen) per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
B. Jadwal dan periode pembayaran;
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.
C. Penghitungan bunga;
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
D. Tata cara pembayaran bunga;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Obligasi dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran.
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

2.8 Pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi;

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang terhutang dan telah jatuh tempo.

- Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan.
- Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

2.9 Bukti Kepemilikan, Konfirmasi Tertulis dan Pengalihan Obligasi:

1. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Rekening dengan Pemegang Obligasi.
2. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
3. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

2.10 Ketentuan Perpajakan Bagi Pemegang Obligasi:

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2.11 Satuan Pemindahbukuan Obligasi:

1. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
2. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

2.12 Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi atau untuk dan atas nama nasabahnya berdasarkan surat kuasa dari Pemegang Obligasi.

2.13 Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2.14 Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.

2.15 Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Pembelian kembali obligasi (buyback)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

3.1 Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

3.2 Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.

3.3 Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan.

3.4 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3.5 Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.

3.6 Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

3.7 Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.

3.8 Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

3.9 Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 3.8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :

1) Periode penawaran pembelian kembali;
2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
3) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
5) Tata cara penyelesaian transaksi;
6) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
8) Tata cara pembelian kembali Obligasi;dan
9) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

3.10 Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

3.11 Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

3.12 Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 3.9 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Perseroan;
2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

3.13 Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:

1) Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
2) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

3.14 Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

3.15 Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;

3.16 Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut, dan

3.17 Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:

1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

4. Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan

4.1 Pembatasan-pembatasan Perseroan.

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, kecuali penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan usaha Perseroan dan terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya Perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan;
b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;
c. Membebankan Jaminan dengan Hak Tanggungan peringkat kedua dan seterusnya;
d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau dimohonkan PKPU atau dibuat pailit oleh pihak lain;
e. Memberikan jaminan perusahaan (*borgtocht*) melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali penanggungan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau penanggungan dari perusahaan yang bergabung dan telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 4.1. huruf a di atas Perjanjian Perwaliamanatan;
f. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
   i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
   ii. Pinjaman atas transaksi dengan normal sepanjang dilakukan berdasar praktek usaha yang wajar dan lazim sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
   iii. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah;
g. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan;

4.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

MAESTRO 90 Adv.

4.3 Kewajiban-kewajiban Perseroan;

Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:

4.3.1 Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi;

4.3.2 Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus telah diterima (in good funds) paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam poin 2 di atas. Apabila sampai tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar denda sebagaimana diatur dalam poin 2.8 di atas;

4.3.3 Menjalankan dan memelihara sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang secara umum diterapkan di Indonesia;

4.3.4 Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau pelunasan Pokok Obligasi;

4.3.5 Menyerahkan kepada Wali Amanat:

Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;

Laporan keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan kepada OJK sesuai dengan peraturan Pasar Modal sebagai berikut:

1) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tahun buku Perseroan berakhir;
2) Laporan keuangan tengah tahunan paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan;
3) Laporan keuangan triwulan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak akhir tanggal laporan triwulanan;

4.3.6 Mempertahankan dan menjaga izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan;

4.3.7 Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sebagai berikut:

a. setiap saat memelihara perbandingan antara utang berbunga dengan ekuitas tidak lebih dari 2:1 (dua berbanding satu);
b. memelihara perbandingan antara EBITDA (laba bersih ditambah bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi) dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5:1 (satu koma lima berbanding satu) untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) berdasarkan laporan keuangan triwulanan;

4.3.8 Mempertahankan agar nilai Jaminan minimal sebesar 100% (seratus persen).

4.3.9 Menunjuk penilai independen yang terdaftar di OJK atas usulan Wali Amanat yang akan ditetapkan oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kembali setiap 2 (dua) tahun sekali yang jatuh pada tanggal ulang tahun Emisi terhadap Jaminan berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam point 8 dibawah selama jangka waktu Obligasi dan menyampaikan hasil peniaian tersebut kepada Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ulang tahun Emisi. Wali Amanat berhak meminta penilaian kembali atas Jaminan sebelum berakhirnya jangka waktu Obligasi apabila dianggap perlu yang tidak dapat ditolak oleh Perseroan tanpa alasan yang wajar;

4.3.10 Memastikan Pemberi Jaminan untuk melakukan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagaimana dimaksud dalam poin 8 di bawah (jika diperlukan);

4.3.11 Perseroan wajib membayar segala biaya-biaya imbalan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

4.3.12 Memberikan izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin atau catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan paling kurang 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

4.3.13 Memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi 1 (satu) tahun sekali dari Perusahaan Pemeringkat dan menyampaikan hasil pemeringkatan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;

4.3.14 Senantiasa mengasuransikan harta kekayaan Perseroan yang dianggap perlu terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan sejenis pada perusaan asuransi yang bereputasi baik.

4.3.15 Menyampaikan kepada Wali Amanat :

i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
iii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
iv. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;

4.3.16 Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan tentang pernyataan dan jaminan Wali Amanat atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut.

4.3.17 Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuaidengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4.3.18 Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi;

4.3.19 Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

4.3.20 Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

4.3.21 Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11 berikut pengubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

5. Kuasa pemegang obligasi kepada Wali Amanat

5.1Sejak tanggal Emisi, setiap Pemegang Obligasi langsung tunduk kepada Perjanjian Perwaliamanatan dan menyetujui untuk dan dengan ini sekarang untuk kemudian pada waktunya secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Wali Amanat tanpa perlu adanya pemberian surat kuasa secara khusus yang baru dari Pemegang Obligasi dalam menjalankan semua hak Pemegang Obligasi tanpa ada pengecualiannya berdasarkan Obligasi, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan dan semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk untuk menjalankan atau melindungi kepentingan setiap Pemegang Obligasi di hadapan instansi peradilan termasuk pengadilan niaga atau di hadapan persidangan arbitrase.

5.2Dengan demikian Pemegang Obligasi diwakili oleh Wali Amanat sebagai pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut berikut lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan yang diadakan kemudian dari perjanjian-perjanjian tersebut serta sebagai pihak yang menjalankan atau melindungi kepentingan setiap Pemegang Obligasi di hadapan instansi peradilan termasuk pengadilan niaga atau di hadapan persidangan arbitrase.

5.3Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, kuasa ini dan semua kuasa lain yang diberikan dalam dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan, maka kuasa-kuasa mana tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama masih ada Pemegang Obligasi.

5.4Perjanjian Perwaliamanatan berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pemberian kuasa-kuasa dari Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan termasuk juga kuasa untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan untuk semua hal yang diputuskan dalam RUPO dan disetujui oleh Perseroan.

6. Kelalaian Perseroan

6.1Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

a. Poin 6.2 huruf a dan g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
b. Poin 6.2 huruf f dan h di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat;
c. Poin 6.2 huruf b, c, d, dan e di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

6.2Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar lebih dari 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan tentang kelalaian Wali Amanat; atau
e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
f. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan Anak Perusahaan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6.3.a. atas inisiatif sendiri atau atas inisiaif pihak lain melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau Kepailitan melalui Pengadilan Niaga;
b. menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*);

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

6.4Ketentuan-ketentuan dalam poin 6.1 dan 6.2 di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam definisi Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan diputuskan oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

7. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan :

7.1RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan ketentuan di bawah ini dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :

a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain.
b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Pernyataan dan Jaminan Wali Amanat dan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalimanatan Efek Bersifat Utang;
d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perubahan tersebut baru berlaku setelah ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan antara Wali Amanat dan Perseroan;
e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 6 mengenai Kelalaian Perseroan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.2Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

a. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

7.3Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan.

7.4Tata Cara RUPO :

a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   - agenda RUPO;
   - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
   - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
   - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) HariKerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
h. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
i. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan.
j. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
k. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan.
l. Pada saat pelaksanaan RUPO :
   - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan
   - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
o. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
p. Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
q. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.

7.5RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
   (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
c. Bila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
   (i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
   (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.

7.6RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.

7.7Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

7.8Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan.

7.9Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

7.10 Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan maka suaranya tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran dalam RUPO dan tidak memiliki hak suara dalam mengambil keputusan.

8. Jaminan

8.1Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemberi Jaminan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagai berikut :

a. Jenis benda jaminan adalah atas tanah dan/atau tanah dan bangunan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang diikat dengan Hak Tanggungan
b. Nilai Jaminan :

   Nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang , yang akan akan diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi dan sebelumnya apabila diperlukan Pemberi Jaminan akan menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
c. Daftar Jaminan, sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini terdiri dari 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) sertifikat tanah Hak Guna Bangunan, yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
d. Status Kepemilikan

   Terdiri dari 86 (delapan puluh enam) sertifikat tanah Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan dan 111 sertifikat tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT APTA CITRA UNIVERSAL .
e. Pembebanan Hak Tanggungan

   Jaminan akan diikat secara Hak tanggungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT') Pembebanan jaminan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi

   Perseroan berkewajiban mendaftarkan APHT melalui Wali Amanat dengan bantuan Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional ditempat jaminan berada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan APHT dan Notaris memberikan fotocopi bukti pendaftaran Hak Tanggungan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional kepada Wali Amanat dan Perseroan.

   Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) UUHT sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris menerima sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional wajib untuk menyerahkan asli sertifikat Hak Tanggungan dan asli sertifikat tanah yang di jaminkan kepada Wali Amanat, serta fotocopy sertifikat Hak Tanggungan dan fotocopy sertifikat tanah yang di jaminkan kepada Perseroan.

8.2Selama jangka waktu Obligasi Perseroan wajib mempertahankan nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 di atas minimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2 di atas. Dalam hal nilai pasar atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin 8.1 di atas turun atau kurang dari minimal sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib menambah Jaminan dengan jaminan lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat.

8.3Dalam hal nilai pasar atas Jaminan melebihi dari minimal sebesar 100% (seratus persen) yang terdiri berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.3.8 di atas, maka Wali Amanat melalui Agen Jaminan atas permohonan Perseroan dapat meroya sebagian Jaminan sehingga sesuai dengan Pasal Perjanjian Perwaliamanatan.

8.4Berdasarkan hasil penilaian per tanggal 30 Mei 2016 nomor laporan : RHR00R1P051.60091 yang dilakukan oleh KJPP Rengganis, Hamid & Rekan selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan, nilai Jaminan yang berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan sesuai dengan laporan penilaian per tanggal sebesar Rp661.530.000.000,-.

8.5Hasil eksekusi Jaminan setelah dikurangi biaya eksekusi, pajak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Agen Jaminan dalam rangka eksekusi, dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan Jumlah Terutang. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka Agen Jaminan wajib mengembalikannya kepada Pemberi Jaminan melalui Perseroan dan apabila hasil eksekusi atas Jaminan tidak mencukupi pembayaran kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi, maka Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi berhak untuk meminta pelunasan dari aktiva lain Perseroan yang tidak dijaminkan secara pari passu dengan kreditor Perseroan lainnya.

8.6Perseroan menyatakan bahwa Jaminan:

8.6.1 Tidak terikat sebagai jaminan utang dengan pihak lain;

8.6.2 Tidak berada dalam sengketa; dan

8.6.3 Tidak akan memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau membebankan dengan jaminan berupa apapun, kecuali dengan persetujuan dari PT Bank Permata Tbk., dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat dan Agen Jaminan tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan sesuai dengan Surat Pernyataan terlampir.

8.7Biaya penilaian atas Jaminan, biaya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, pembuatan sertifikat hak tanggungan, pelepasan (roya) atas hak tanggungan, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan pemberian Jaminan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan dan sebelumnya biaya-biaya tersebut harus dikonfirmasikan secara tertulis kepada Perseroan.

8.8 Dalam hal Jaminan sebagaimana dimuat dalam akta-akta yang ditandatangani secara sah di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran dengan baik dan pada waktunya dari Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Jumlah Terutang, maka seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas Jumlah Terutang kepada Pemegang Obligasi dan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditornya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para kreditornya.

9. Force Majeure

9.1Para pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang disebabkan secara langsung oleh kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak (Force Majeure), yaitu :

(i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia atau adanya tindakan antiterorisme di Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional atau internasional yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau;
(ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri, dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau
(iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan;

9.2Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut. Jika pihak yang tidak mengalami Force Majeure dengan itikad baik meragukan terjadinya Force Majeure, maka Wali Amanat dan Perseroan akan bersama-sama menilai apakah kejadian tersebut benar Force Majeure sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan para pihak sepakat mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

10.Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan :

Nama	:	PT Bumi Serpong Damai Tbk
Alamat	:	Grand Boulevard, BSD Green Office Park BSD City, Tangerang 15345
Telepon	:	(021) 50 368 368
Faksimili	:	(021) 5058 8278
Untuk perhatian	:	Direksi

WALI AMANAT :

Nama	:	PT Bank Permata Tbk
Alamat	:	Gedung WTC II Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia
Telepon	:	(021) 5237788
Faksimili	:	(021) 2500529
Untuk perhatian	:	Head Securities & Agency

Untuk Layanan Pengaduan Pemegang Obligasi :
Permata Bank Tower III Lantai 1
Jalan Muhammad Husni Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren
Tangerang 15224

Telepon	:	(021) 1500 399
Untuk Perhatian	:	Client Services
Email	:	clientservices@permatabank.co.id

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 10 Juni 2016 dan ditutup pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No.IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No.IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi. Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2016 pukul 12.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 12.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin Jakarta No. Rekening : 0037625779 Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening : 00971134003 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701392302 Atas nama: PT Indo Premier Securities	Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara BCA Jakarta No. Rekening : 2050030345 Atas nama: PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10.Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 Juni 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11.Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 di KSEI No. SP-0018/PO/KSEI/0416 tanggal 5 April 2016, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnyapada Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek, sebagaimana dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis yan diterbitkan oleh KSEI, merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12.Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, bilamana terjadi hal-hal yang disebut dalam Peraturan No.IX.A.2.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan karena sebab apapun sebelum atau setelah Tanggal Pembayaran, maka pembayaran pemesanan Obligasi tersebut yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan wajib dikembalikan kepada para pemesan selekas mungkin, namun tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengakhiran/pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

13.Lain-Lain

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan atau Pemegang Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah uang pemesanan yang terlambat dibayar, denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal penjatahan atau tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut dihitung secara harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dibayar lunas) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau terjadi kelebihan pemesanan, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayarkan, maka Manajer Penjatahan harus mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Penjamin Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Securities Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 Tel. (021) 57931168 Fax. (021) 57931167 Website : www.indopremier.com	**PT Mandiri Sekuritas** Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel. (021) 5263445 Fax. (021) 5263507 Website: www.mandirisekuritas.co.id Email : corsec@mandirisek.co.id
PT BCA Sekuritas Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Tel: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7300/ 7250 Website; www.bcasekuritas.co.id Email : cf@bcasekuritas.co.id	**PT Sinarmas Sekuritas** (terafiliasi) Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 5 Jl. MH Thamrin No.51 Jakarta 10350 Tel. (021) 3925550 Fax. (021) 3922269 Website: www.sinarmassekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU PROSPEKTUS

MAESTRO 90 Adv.